



Hotel Menolak Pengetatan Diperpanjang

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DIPERPANJANG

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021. PPKM periode 11-25 Januari diberlakukan di DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jatim, dan Bali.

JOGJA- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY secara tegas menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Lugas Subarkah, Jumali, & Hafit Yudi Suprobo
redaksi@harianjogja.com

Ketua Badan Perwakilan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, secara tegas menolak perpanjangan kebijakan yang di DIY disebut dengan istilah Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). "Kenapa alasan kami menolak, dampak dari PTKM ini menyebabkan tingkat hunian merosot tajam sampai saat ini hanya 13,5 persen dan reservasi drop," ujarnya, Kamis (21/1).

Tak dimungkiri, selama PTKM diberlakukan di DIY, hotel tetap bisa buka dan menerima tamu. Namun tamu hotel jadi ragu berkunjung di tengah situasi seperti ini. "[Hotel tetap] Buka tapi orang mau berwisata dengan seperti itu dari luar mau ke suatu daerah dia masih ragu. Nanti di daerah wisatanya diterima enggak ya. Padahal PHRI sudah menyampaikan tidak apa-apa, asal sesuai dengan proses," katanya.

Dampak PTKM, diceritakan Deddy, begitu memilukan. Dari 400 hotel dan restoran anggota PHRI,

- ▶ Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY secara tegas menolak perpanjangan pembatasan.
- ▶ Pada Kamis, terjadi penambahan 456 kasus di Bumi Mataram, yang merupakan jumlah tertinggi selama ini.

30 di antaranya telah tutup dan terpaksa memberhentikan k a r y a w a n . Beberapa lainnya yang hampir mati, hanya buka kalau ada tamu dan karyawannya sudah banyak yang dirumahkan. Sementara yang terengah-engah masih tetap buka dengan tamu yang hanya sedikit dan karyawannya juga sudah mulai dikurangi.

"Kami untuk saat ini dari 400 anggota, 200 anggota itu hampir mati, 30 mati, sisanya terengah-engah. Dengan kondisi saat ini, kami untuk bertelan itu sulit dan kami masih bingung apalagi yang harus kami kerjakan. Dari Maret, BPD PHRI DIY sudah melakukan *action* sampai dengan saat ini," katanya.

Aksi yang disebutkan Deddy merujuk pada verifikasi proses yang telah dijalankan segenap pengusaha hotel dan restoran.

<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<p style="text-align: center;">Tindak Lanjut</p> <p><input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi</p> <p><input type="checkbox"/> Untuk Diketahui</p> <p><input type="checkbox"/> Jumpa Pers</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Kepala</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="font-size: x-small; text-align: right;">ono, S.Sos, MM 723 199603 1 005</p>
---	--

▶ Halaman 10

Alasan Perpanjangan PPKM

- Masih tingginya kasus transmisi virus Corona (Covid-19).
- Dari tujuh provinsi yang diberlakukan PPKM, hanya dua provinsi yakni DIY dan Banten yang dinilai berhasil menurunkan kasus Covid-19.

Wilayah Pemberlakuan PPKM

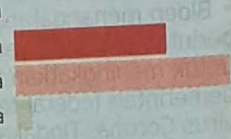
Provinsi

- Total 7 provinsi
- Penurunan kasus 2 provinsi



Kabupaten/kota

- Total 73 kabupaten/kota
- Risiko tinggi 29 kabupaten/kota
- Risiko sedang 41 kabupaten/kota
- Risiko ringan 3 kabupaten/kota



Data keterpakaian RS

Provinsi di Jawa & Bali*

1. Banten	79,23%
2. DKI Jakarta	85,55%
3. Jawa Barat	77,31%
4. Jawa Tengah	69,61%
5. DIY	83,18%
6. Jawa Timur	72,14
7. Bali	67,40%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

*) per 20 Januari

Grafis: Harlan Joqja/Hengki Irawan Sumber: Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kasus Mingguan

- 52 kabupaten/kota masih naik.
- 21 kabupaten/kota kasus menurun.

Kasus Aktif

- 46 kabupaten/kota masih meningkat.
- 24 kabupaten/kota menurun.
- 3 kabupaten/kota tetap.

Hotel Menolak...

"Kami masih berharap komitmen pemerintah antara kesehatan dan ekonomi harus berjalan beringan bukan saling mematikan atau salah satu diutamakan. Tapi beringan, ini poin yang harus saya sampaikan," katanya.

Bahkan, kata Deddy, anggota PHRI akan menggelar aksi menyikapi perpanjangan itu. "Ini kan kalau diperpanjang itu kan keprihatinan dunia pariwisata. Kalau diperpanjang itu duka bagi kami. Maka wujud dari duka itu kami semua serentak se-DIY akan memasang pita hitam di dada sebelah kiri," ujar Deddy.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Korwil DIY, Dani Eko Wiyono menyebut pemerintah mengambil keputusan perpanjangan PTKM tanpa memandang dengan jelas kondisi masyarakat saat ini terutama untuk kalangan buruh. Penerapan aturan 50% *work from office* (WFO) dan 50% *work from home* (WFH) tidak dibarengi kebijakan untuk kesejahteraan buruh. Dengan skema tersebut, tentu akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh.

"UMR yang tidak seimbang dengan kebutuhan hidup layak seorang pekerja yang tinggal di Jogja, skema ini tentu semakin merugikan. Dampak pandemi sudah sangat menyakitkan pekerja. Hingga kini belum menerapkan aturan yang pro terhadap pekerja, tentu ini hal yang menyedihkan," ujar Dani.

Akibat dari menurunnya pendapatan buruh, ditegaskan Dani, akan membuat daya beli masyarakat menurun. Apalagi harga kebutuhan primer dan sekunder sama sekali tidak turun. Upaya pemerintah memberikan bantuan langsung kepada buruh, dianggap Dani belum dirasakan manfaatnya. Pasalnya, persyaratan penerima bantuan berbanding terbalik dengan kondisi nyata di sektor informal.

Ditambah, berbagai aturan pengetatan yang mana masyarakat hanya menjadi objek, semakin membuat masyarakat kian terekan. Menurutny, penanganan pandemi yang cenderung coba-coba tanpa dibarengi upaya nyata dalam pemulihan, akan semakin menyengsarakan masyarakat.

Dani juga menyoroti penerapan jam operasional sektor usaha dan perdagangan yang tidak rasional, cenderung dipaksakan sebagai formalitas. Sektor usaha dan perdagangan nonkebutuhan

pokok hanya dibatasi melayani pelanggan mulai dari pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB.

Pemerintah Pusat memutuskan memperpanjang PPKM selama dua pekan setelah 25 Januari mendarang di sejumlah daerah dengan indikator tertentu. Pemda DIY akan mengikuti kebijakan ini jika memang tidak ada penurunan kasus harian Covid-19. Diperpanjang

Diperpanjang
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, memastikan Pemda DIY akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. "Kalau Pemerintah Pusat memperpanjang, tidak ada pilihan Jogja juga perpanjang," ujarnya, Kamis.

La melihat sampai saat ini belum ada penurunan signifikan pada kasus harian Covid-19. Pada Kamis terjadi penambahan 456 kasus yang merupakan jumlah tertinggi selama ini.

Sultan berharap masyarakat mampu turut mendukung kebijakan ini dengan disiplin protokol kesehatan khususnya di lingkungan keluarga dan tetangga. Ia berharap masyarakat di tingkat RT dan RW dapat kembali diggerakkan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan terkecil. Sebab, pada lingkup keluarga dan tetangga tidak bisa dijangkau tim penegakan hukum.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bantul, Helmi Jamilaris, mengaku masih menunggu arahan dari Pemda DIY terkait dengan perpanjangan PTKM hingga 8 Februari mendarang. Dia mengungkapkan sejauh ini pelaksanaan PTKM di Bantul dinilainya berjalan baik. Hal ini seiring mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Sayangnya, pelaksanaan PTKM ini justru tidak berkorelasi dengan penurunan zona merah di Bantul. Saat ini, jumlah zona merah di Bantul justru meningkat. Dari 17 kapanewon di Bantul, sebanyak 13 kapanewon berstatus zona merah. Sisanya, tiga kapanewon masuk zona orange, dan satu kapanewon zona kuning.

Indikator Kemendagri
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan PPKM diperpanjang karena masih tingginya kasus Covid-19. Sebab, dari tujuh provinsi yang diberlakukan PPKM, hanya dua daerah yang berdampak pada

penurunan kasus Covid-19.

Kemendagri telah memiliki sejumlah indikator bagi daerah yang perlu memperpanjang PPKM, meliputi tingkat kematian akibat Covid-19 di daerah di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau di atas 3%, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata kesembuhan nasional atau 82%, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur (*bed occupancy rate*/BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%. "Dari tujuh provinsi, terlihat masih ada peningkatan di lima provinsi, dan yang menurun di Bantul dan Yogyakarta [DIY]," kata Airlangga Hartarto, Kamis.

Berdasarkan kondisi itu, kata Airlangga, atas instruksi Presiden Jokowi, PPKM kembali diperpanjang. Nantinya, Mendagri menerbitkan instruksi kepada kepala daerah yang menerapkan PPKM.

Pecah rekor

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, mengatakan penambahan kasus positif Covid-19 DIY pada Kamis sebanyak 456 kasus berdasarkan pemeriksaan pada 1.109 sampel dari 1.046 orang. Jumlah ini fantastis, selain karena jumlah ini menjadi jumlah tambahan kasus harian tertinggi, tingkat positif (*positivity rate*) kasus harian juga sangat tinggi mencapai 43,5%.

Menurut Berty, berdasarkan domisili, penambahan kasus meliputi Kota Jogja sebanyak 61 kasus, Bantul (182), Kulonprogo (20), Gunungkidul (14), dan Sleman (179 kasus). Dilhat dari riwayat, penambahan kasus terdiri dari tracing kasus positif (259 kasus), periksa mandiri (126), screening karyawan kesehatan (2), pelaku perjalanan luar daerah (1), dan belum ada keterangan (68).

Sebanyak sembilan kasus dilaporkan meninggal dunia terdiri dari lima warga Kota Jogja, dua warga Bantul dan masing-masing satu warga Sleman serta Gunungkidul. Sebanyak 206 kasus dinyatakan sembuh, berdasarkan domisilinya meliputi Kota Jogja (3), Bantul (133), Kulonprogo (1), Gunungkidul (43), dan Sleman (26). Dengan penambahan ini, total kasus positif DIY menjadi sebanyak 18.258 kasus, dengan rincian 5.778 kasus aktif, 12.053 kasus sembuh dan 417 kasus meninggal.

(Detik/Catut Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 21 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005